

workshop Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial atau *Gender Equality and Social Inclusion* (GESI) dan Perlindungan Anak, untuk Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi NTB yang dilaksanakan di Ruang Rapat Rowot, Dinas Perhubungan Provinsi NTB. jln. Langko no.49, pada 23 – 24 April 2018.

Acara dibuka oleh Bapak Asep Supriatna Kabid Transportasi Darat Dishub NTB, dan yang hadir di acara tersebut adalah Ibu Kasmiati sebagai fasilitator/narasumber dari PIUC, Ibu Rahmi sebagai fasilitator/narasumber dari PIUC, Ibu Ririn sebagai fasilitator/narasumber dari PIUC, Ibu lilla Noerhayati sebagai narasumber dari PUG PUPR, Bapak Antonius dari DPD Organda FLLAJ, Bapak Iwayan dari Akademisi UNRAM, Bapak Rudi dari Akademisi UMM, Bapak Made dari Ditlantas Polda NTB, Ibu Merry, Ibu Madiana dari IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), Ibu Muradah, Ibu Khadijah dari HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) NTB, dan Ibu Baiq dari Media cetak dan elektronik NTB.

Tujuan Workshop yaitu untuk meningkatkan kapasitas anggota, agar : Forum LLAJ yang terdiri dari wakil kelompok masyarakat yaitu dari PNS (Polda Polda, Dinas Perhubungan, Organda), Non PNS (IWAPI, HWDI, Perguruan Tinggi, Ulama, Media cetak)

1. Memahami konsep GESI dan CP, peraturan yang terkait dan pentingnya mengintegrasikan dalam program/kegiatan pada setor infrastruktur
2. Memahami Analisa GESI pada program/kegiatan PRIM
3. Dapat mengembangkan alat monitoring dan evaluasi kegiatan yang teridentifikasi mempunyai isu kesenjangan GESI dan CP pada siklus proyek pengelolaan jalan.

Sasaran akhir Workshop tersebut adalah dalam rangka mendukung tujuan PRIM, yaitu meningkatkan kinerja sector Bina Marga di Provinsi NTB dan Kab. Lombok Barat, pengelolaan dan pemeliharaan pada jaringan jalan yang berkelanjutan, dan biaya pengguna jalan menjadi optimal dari sisi sosial dan ekonomi.

Agenda rapat sbb:

Hari Pertama :

1. Pengenalan Konsep GESI dan kebijakan perlindungan anak dan pentingnya untuk diintegrasikan dalam pembangunan.
2. Peraturan terkait GESI dan perlindungan anak terkait sector infrastruktur, khususnya konstruksi jalan.
3. Analisa gender dan anggaran responsive gender.

Hari Kedua :

1. Identifikasi pengintegrasian GESI dan CP pada Lalu lintas angkutan jalan,
2. Pengembangan alat untuk memonitor GESI dan perlindungan anak dalam siklus pengelolaan jalan.

Metodologi Workshop :

Fasilitator memberikan materi-materi tersebut di atas dan peserta saling berinteraksi memberikan pandangannya. Materi diberikan dengan games, kasus studi, diskusi grup, dan

narasumber memberikan materi tentang regulasi dan best practice serta klarifikasi dari hasil diskusi.

Garis besar hasil Lokakarya :

Peserta mendapat informasi tentang analisa gender pada setiap project cycle pengelolaan jalan dan Indikator GESI dan CP dari hasil workshop Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial atau *Gender Equality and Social Inclusion* (GESI) dan Perlindungan Anak, untuk Dinas Bina Marga Provinsi dan Kabupaten Lombok Barat :

Rencana Tindak Lanjut.

- a. Sosialisasi untuk anggota IWAPI dan HWDI tentang GESI dan CP oleh masing2.
- b. Anggota FLLAJ agar memastikan semua Unit Tugas mengimplementasikan pelaksanaan monev dengan indikator GESI dan CP dalam pengelolaan jalan.
- c. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) dan Advisor GESI dan CP mengkomunikasikan hasil Workshop dengan mitra Dinas PU;
- d. Dinas Perhubungan Provinsi berkeinginan untuk membuat Pilot Project penyediaan pedestrian yang berwawasan GESI dan CP;
- e. Perlu mempertimbangkan keberlanjutan kelembagaan FLLAJ yang akan berakhir tahun 2019, sebagai wadah interaksi masyarakat dengan pengelola jalan;
- f. Menyediakan fasilitasi, prasarana-sarana komunikasi terkait minimnya standar komunikator PUG di daerah;
- g. Mengkaji model bangunan untuk kebutuhan disabilitas dan lansia dengan merferensi pada Perda Bangunan Gedung.

Kesimpulan :

1. Perlu ditingkatkan sosialisasi yang terus menerus tentang GESI dan CP pada pengelola jalan dan mitra kerja termasuk pada masyarakat, perguruan tinggi, anggota IWAPI, dan anggota HWDI dengan melembagakan FLLAJ sebagai wadah informasi, komunikasi dan partisipasi wakil-wakil kelompok masyarakat.
2. Perlu kerjasama dengan Kementerian PUPR untuk merealisasikan pilot proyek penyediaan fasilitas pejalan kaki/trotoar yang responsive gender.
3. Model pelatihan/capacity building yang merupakan gabungan fasilitator / LSM dan dari Tim PUG-PUPR dapat dijadikan best practice

Lampiran Dokumentasi Workshop Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial atau *Gender Equality and Social Inclusion (GESI)* dan Perlindungan Anak, untuk Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan



